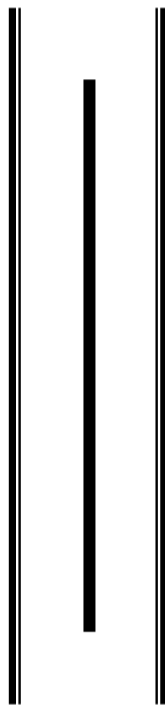




# **Rencana Kerja ( RENJA )**

DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2021



**Sekretariat :  
Jl. Prof. M. Yamin No. 57 Selong  
Kabupaten Lombok Timur**

## **B A B I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan perubahan system pemerintahan yang mengikuti perkembangan paradigma yang berkembang di masyarakat, mengharuskan suatu pemerintahan dijalankan dengan baik (Good Governance) yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka hal tersebut di atas, maka perlu adanya Rencana Kerja yang baik berpihak kepada masyarakat.

Pertumbuhan dan perkembangan Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur ditunjang oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Khusus untuk sektor Industri dan Perdagangan, potensi sumber daya produksi dari sektor pertanian dalam arti luas dan sektor kehutanan yang terdiri dari hasil pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan hasil hutan yang banyak menghasilkan berbagai bahan mentah sebagai kebutuhan bahan baku/bahan penolong bagi industri, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual dan dapat memberikan kontribusi yang semakin besar dalam rangka peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi serta nilai produksi.

#### **B. Dasar Hukum**

Tuntutan reformasi dalam era global, membutuhkan adanya suatu komitmen yang kuat bagi organisasi dalam hal ini instansi pemerintah untuk mampu menjabarkan tuntutan tersebut, kemudian di implementasikan dalam suatu perencanaan yang matang dengan intelektualitas yang handal dan terukur. Reformasi kewenangan pemerintah sejalan dengan diterapkannya Undang- undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan perubahan mendasar yang mengharuskan semua organisasi pemerintah perlu mengetahui dimana organisasi itu sekarang, bagaimana mencapai tujuan dan bagaimana mengukur kemajuan yang berhasil dicapai.

#### **C. Gambaran Umum SKPD**

Sesuai Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan adalah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi terdiri dari :
    - a. Seksi Sarana Distribusi
    - b. Seksi Pelaku Distribusi
    - c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)
  4. Bidang Kemetrolgian, terdiri dari :
    - a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
    - b. Seksi Bina SDM
    - c. Seksi Pengawasan
  5. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
    - a. Seksi Pengembangan Ekspor
    - b. Seksi Fasilitas Ekspor Impor
    - c. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor
  6. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, terdiri dari :
    - a. Seksi Pengendalian Barang Pokok
    - b. Seksi Pengendalian Barang Penting
    - c. Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang diatur.

Jumlah personil ASN Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur per Desember 2020 berjumlah 43 orang terdiri dari :

- |               |             |
|---------------|-------------|
| 1. Eselon II  | : 1 Orang   |
| 2. Eselon III | : 5 Orang   |
| 3. Eselon IV  | : 14 Orang  |
| 4. Staf       | : 23 Orang. |

Jumlah menurut Golongan terdiri dari :

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan IV  | : 5 Orang  |
| 2. Golongan III | : 31 Orang |
| 3. Golongan II  | : 7 Orang  |
| 4. Golongan I   | : - Orang  |

Jumlah menurut pendidikan terdiri dari :

1. S2 : 1 Orang
2. S1 : 30 Orang
3. D3 : 1 Orang
4. D1 : - Orang
5. SLTA : 10 Orang
6. SLTP : 1 orang

Dari sejumlah aparatur tersebut di atas, untuk S1 dan S2 mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda antara lain :

1. Magister Hukum : 1 Orang
2. Sarjana Pendidikan : 1 Orang
3. Sarjana Teknik Industri : 1 Orang
4. Sarjana Teknik Kimia : 1 Orang
5. Sarjana Teknik Mesin : - Orang
6. Sarjana Teknik Sipil : 1 Orang
7. Sarjana Teknik Elektro : 1 Orang
8. Sarjana Pertanian : 3 Orang
9. Sarjana Ekonomi : 5 Orang
10. Sarjana Perikanan : 1 Orang
11. Sarjana Sosial : 4 Orang
12. Sarjana Administrasi Publik : 5 Orang
13. Sarjana Hukum : 6 Orang
14. Sarjana Biologi : 1 Orang

### **Kelengkapan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan 31 Desember 2020 memiliki kelengkapan berupa sarana dan prasana antara lain :

1. Kendaraan Roda 4 : 4 buah
2. Kendaraan Roda 2 : 3 buah
3. Komputer : 11 Unit
4. Laptop : 14 Unit
6. Dan lain-lain

### **D. Kondisi Saat ini**

Kondisi Sektor Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan Tahun 2020 digambarkan sebagai berikut :

- **Urusan Perindustrian**

Untuk Urusan Perindustrian yang menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan adalah meningkatnya pembinaan sektor industri.

**Tabel 1**  
**Capaian Indikator Kinerja/Pengukuran Pencapaian Sasaran Sektor Perindustrian Tahun 2020**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian (Tahun)				Capaian (%)
			2018		2019		
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Prosentase peningkatan pelaku usaha industri dan perdagangan	%	0,5	0,4	0,6	0,18	30

Adapun indikatornya adalah :

- Prosentase Peningkatan pelaku usaha industri dan perdagangan adalah target peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,6 %, realisasinya 0,18 % (30%).

Untuk Urusan Perindustrian, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah Unit Usaha sebab dengan meningkatnya jumlah unit usaha maka akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Dalam Tahun Anggaran 2020 Dinas Perindag Kabupaten Lombok Timur belum mencapai target sasaran yang telah ditetapkan, dengan penambahan jumlah Unit Usaha dari tahun 2019 sebanyak 41 Unit Usaha atau naik 0,18 %. Capaian realisasi peningkatan jumlah Unit Usaha tidak mencapai target 0,6 % dikarenakan masih kurangnya kesadaran para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan perdagangan yang baru memulai usahanya untuk mengurus perijinan dan mendaftarkan kegiatan industrinya serta kondisi Pandemi Covid 19 mulai awal tahun 2020 membuat usaha semakin menurun.

Pada Tahun Anggaran 2020 Bantuan Prasarana bagi IKM dari Pemerintah Provinsi berupa Peralatan kemasan kepada 16 IKM diwilayah kecamatan Sembalun, Selong, Terara dan Lendang Nangka.

➤ **Urusan Perdagangan**

Untuk Urusan Perdagangan target yang ingin dicapai adalah peningkatan transaksi perdagangan luar daerah dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok Pada tahun 2020 target yang harus dicapai adalah :

**Tabel 2**  
**Capaian Indikator Kinerja/Pengukuran Pencapaian Sasaran Sektor**  
**Perdagangan Tahun 2020**

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian (Tahun)				Capaian (%)
			2018		2019		
			Target	Capaian	Target	Capaian	
1.	Prosentase Peningkatan transaksi perdagangan luar daerah	%	2,1	2,1	2,2	0.99	45
2.	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok	%	4,75	-0,8	4,50	5.95	75.63

- Prosentase Peningkatan transaksi perdagangan luar daerah target 2,2 % dan realisasi 0.99. % atau prosentase capaian indikator 45 %
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok untuk tahun 2020, target 4,5 % dan realisasi 5.95 % atau capaian sebesar 75,63 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Bidang Perdagangan, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain pembangunan sarana dan prasarana pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2020 Dinas Perindag mendapat Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan yaitu Pembangunan Pasar Sembalun Raya Kec. Sembalun.

Selain itu juga untuk membantu kondisi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur yang terdampak Covid-19 di awal tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan bantuan berupa paket bahan pangan/sembako sebanyak 166.217 paket dan juga dilaksanakan pasar murah di 17 lokasi

Demikian juga untuk kegiatan lain yaitu pemberian bantuan gerobak dorong sebanyak 4 unit, Booth Portabel sebanyak 4 unit dan Gerobak motot sebanyak 4 unit yang bersumber dari Dinas Perdagangan Prov. NTB yang diperuntukkan bagi pedagang di beberapa kecamatan yaitu Selong, Pringgasele, Aikmel, Lenek, Pringgabaya dan Keruak

### 1.1.2. Evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindag Kabupaten Lombok Timur dari penetapan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perindag

Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- Prosentase peningkatan pelaku usaha industri dan perdagangan adalah target peningkatan pada tahun 2020 sebesar 0,6 %,
- Prosentase Peningkatan transaksi perdagangan luar daerah target 2,2 %
- Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok untuk tahun 2020, target 4,5 %

Adapun realisasi/capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindag tahun 2020 dari target yang ditetapkan adalah :

1. Prosentase peningkatan pelaku usaha industri dan perdagangan sebesar 0,18 %, tidak mencapai target yang diharapkan atau dengan capaian indikator kinerja 30 %.
2. Prosentase Peningkatan transaksi perdagangan luar daerah mencapai target yang ditetapkan yaitu 0.99 % atau dengan capaian indikator 45 %
3. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok melebihi target yang ditetapkan yaitu realisasi 5.95 % atau capaian sebesar 75.63 %

Faktor penyebab tidak terlampaui target pada point 1 di atas adalah Masih kurangnya kesadaran para pelaku Industri Kecil dan Menengah dan perdagangan yang baru memulai usahanya untuk mengurus perijinan dan mendaftarkan kegiatan usahanya serta usaha yang menurun akibat pandemi covid 19 sejak awal tahun.

Sedangkan faktor tidak terlampauinya target pada point 2 dan 3 diatas adalah karena dana yang kurang memadai, dimana pembangunan pasar dan fasilitas lain mengandalkan Dana APBN dan Dana DAK, dimana karena pandemi covid 19 mengalami refocusing anggaran, Dana DAK dialihkan untuk kegiatan bantuan sembako kepada masyarakat selain itu juga penurunan omzet pengusaha serta daya beli masyarakat yang rendah walaupun juga telah dilakukan beberapa kali kegiatan operasi pasar murah..

Berdasarkan uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana uraian pada tabel di atas, bahwa capaian target indikator sasaran dapat dicapai dengan baik tanpa menghadapi kendala. Dengan demikian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dapat mencapai target sasaran dengan predikat **cukup**, karena capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) : rata-rata 50.21 % .

### **1.1. Permasalahan & Solusi**

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, maka secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur juga masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan antara lain sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina bidang Perindustrian dan Perdagangan
- b) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
- c) Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina
- d) Plafon Anggaran belum memadai.

### **Solusi**

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Kuantitas dan kualitas SDM aparatur lebih memadai sesuai profesionalisme dan job yang ada.
2. Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait
3. Dukungan prasarana dan sarana operasional aparat pembina ditingkatkan.
4. Plafon/anggaran rutin dan anggaran pembangunan disektor Perindustrian dan Perdagangan dapat lebih ditingkatkan.

### **1.2. Akuntabilitas Keuangan**

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2020, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.445.781.173,- ( Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), realisasi sebesar Rp. 3.351.407.426,- ( Tiga milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah ) atau 97,26 %. Sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 46.946.076.400,- ( Empat puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). Realisasi sebesar Rp. 46.439.192.392,- ( Empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 98,92 %. Total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 50.391.857.573,- (Lima puluh milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh tujuh



ribu dua ratus lima rupiah), realisasi sebesar Rp. 49.790.599.818,- ( Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau 98,81 %.

Dari jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Perindag pada tahun 2020, cukup memadai, khususnya pada Bidang Perdagangan. Akan tetapi pada bidang lain seperti Bidang Perindustrian terkait dengan jumlah anggaran, bisa dikatakan masih sangat tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan, dan untuk lebih jelasnya laporan realisasi pada tahun 2020.

Kami berharap semoga ditahun yang akan datang jumlah anggaran yang diberikan oleh TAPD sesuai dengan hajat orang banyak/masyarakat, khususnya terkait dengan dana pembinaan kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya realisasi Anggaran dan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

**Tabel 3.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2020 dan Dibandingkan dengan Tahun 2019**

No	Belanja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (2020) (Rp)	Selisih Lebih/ Kurang (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	<b>3.445.781.173</b>	<b>3.351.407.426</b>	<b>94.373.747</b>	<b>97.26</b>
	Belanja Pegawai	3.445.781.173	3.351.407.426	94.373.747	97.26
2.	Belanja Langsung	<b>46.946.076.400</b>	<b>46.439.192.392</b>	<b>506.884.008</b>	<b>98.92</b>
	a. Belanja Pegawai	357.506.000	332.600.000	24.906.000	93.03
	b. Belanja Barang & Jasa	45.606.755.400	45.223.424.492	383.330.908	99.16
	c. Belanja Modal	981.815.000	883.167.900	98.647.100	89,95
	<b>Jumlah</b>	<b>50.391.857.573</b>	<b>49.790.599.818</b>	<b>601.257.755</b>	<b>98,81</b>
	Belanja Tidak Langsung Tahun 2019	<b>3.299.751.505</b>	<b>3.259.337.797</b>	<b>40.413.708</b>	<b>98,78</b>
	Lebih / Kurang	146.029.668	92.069.629	53.960.039	63.05
	Belanja Langsung Tahun 2019	<b>17.517.004.700</b>	<b>16.995.442.587</b>	<b>521.562.113</b>	<b>97,02</b>
	Lebih / Kurang	29.429.071.700	29.443.749.805	(14.678.105)	100,05
	<b>Jumlah Tahun 2019</b>	<b>20.816.756.205</b>	<b>20.254.780.384</b>	<b>561.975.821</b>	<b>97,30</b>
	Lebih / Kurang	29.575.101.368	29.535.819.434	39.281.934	99.88

## B A B I I

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Visi dan Misi

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Selaras dengan perubahan paradigma dalam kegiatan pembangunan yang perlu mengakomodasikan perubahan dalam masyarakat, mendorong terciptanya pemerintahan yang baik ( Good Governace ), memperbaiki kinerja sektor publik dalam rangka membudayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta dengan semakin besarnya tantangan sebagai konsekuensi logis dari era globalisasi, maka penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi ( Renstra ) merupakan suatu langkah yang sangat penting.

Visi adalah gambaran tentang keadaan/sosok masa depan yang lebih baik dan bersifat menantang. Dan hal tersebut tetap mengacu pada visi Kabupaten Lombok Timur yaitu Visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Timur untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

**“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”**

#### Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

- Misi 2 : Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel. 4

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<b>Visi : Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman</b>				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 2 : Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan bidang perdagangan</li> <li>- Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Perda</li> <li>- Belum optimalnya daya dukung anggaran</li> <li>- Keterbatasan jangkauan pelayanan dan promosi produk unggulan</li> <li>- Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tapi melalui mekanisme pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lemahnya sosialisasi</li> <li>- Terbatasnya SDM</li> <li>- Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha</li> <li>- Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha</li> <li>- Terbatasnya anggaran</li> <li>- Belum memiliki data seluruh potensi usaha perdagangan dan UKM secara up to date</li> <li>- Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peraturan yang mendukung</li> <li>- Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha</li> <li>- Adanya komitmen pengembangan usaha perdagangan dan UKM</li> <li>- Banyaknya jumlah BUMN, perbankan, lembaga keuangan lainnya.</li> </ul>

### 2.3. Tujuan dan Sasaran

#### Tujuan dan Sasaran OPD

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu mengacu pada misi yang kedua dan

ketiga, maka Dinas Perindag Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**T u j u a n :**

- ✓ Terjaganya kestabilan harga bahan pokok dan barang penting

**S a s a r a n :**

- ✓ Stabilitnya harga bahan pokok dan barang penting

#### **2.4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal, maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ada 3 komponen yaitu : Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

**Strategi :**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan Sarana dan Prasarana / infrastruktur daerah yang diarahkan agar mampu mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam untuk menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Arah Kebijakan :**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan Dinas yang akan dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada setiap tahun. Dalam perencanaan strategi ditetapkan sebuah kebijaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijaksanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur dalam 5 tahun ( 2018 – 2023). Adapun Kebijakan yang ditetapkan adalah sbb.

1. Meningkatkan tertib usaha perdagangan
2. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang perdagangan
3. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan kearifan lokal
4. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan.

#### **D. Rencana Kinerja Tahun 2021**

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan berupa Program dan Kegiatan sebagai berikut :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

➤ **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

➤ **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten
- Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR, dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

➤ **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dengan jenis kegiatan :**

- Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

**E. Penetapan Kinerja**

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipedomani adalah :

- Fluktuasi harga bahan pokok dan barang penting sebesar 5,5 %

## **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Keberhasilan**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan paparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 secara umum dapat dikatakan masih kurang, karena rata-rata yang dapat dicapai dengan nilai cukup. Pernyataan tersebut tentu didukung oleh :

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai rata-rata 50.21%.
- b. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai rata-rata 50.21 %.

Nilai rata-rata indikator yang telah dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 tidak terlepas dari kondisi pandemi covid 19 sejak awal tahun dimana dunia usaha mengalami penurunan omzet serta rendahnya daya beli masyarakat.

#### **B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 secara umum juga masih menghadapi kendala dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kendala tersebut antara lain

1. Lemahnya kualitas SDM aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan para pengusaha industri dibidang pemasaran, yang meliputi aspek mutu, kualitas produk, jaringan pemasaran serta masih kurangnya pemahaman tentang manfaat promosi/pameran sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pemasaran.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

#### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan seluruh kegiatan sektor Perdagangan Kabupaten Lombok

Timur, sehingga pada waktu yang akan datang dapat meraih hasil yang lebih baik antara lain :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Dinas Perdagangan sesuai profesionalisme dan job yang ada.
2. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang pemasaran UKM serta meningkatkan kualitas dan mutu produk UKM.
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 untuk Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya, terima kasih.

Selong, Januari 2021

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur





**RENCANA KERJA ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2021**

Urusan Pmrnthn : 3.30 Urusan pilihan Perdagangan  
 Organisasi : Dinas Perdagangan

NO					PPROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH BELANJA (Rp)
1						3
3	30	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,596,358,205</b>
3	30	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,500,000
3	30	01	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000
3	30	01	2.01	06	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000
3	30	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,203,161,205
3	30	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,137,058,205
3	30	01	2.02	03	SKPD	66,103,000
3	30	01	2.03		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,600,000
3	30	01	2.03	06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,600,000
3	30	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000
3	30	01	2.05	05	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,000,000
3	30	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,306,000
3	30	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,273,000
3	30	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,440,000
3	30	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,009,000
3	30	01	2.06	06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,484,000
3	30	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,100,000
3	30	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,370,000
3	30	01	2.07	05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	13,370,000
3	30	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38,482,300
3	30	01	2.08	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,407,300
3	30	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000
3	30	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17,075,000
3	30	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251,938,700
3	30	01	2.09	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20,306,250
3	30	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23,652,450
3	30	01	2.09	05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,480,000
3	30	01	2.09	09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202,500,000
3	30	02			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>18,000,000</b>
3	30	02	2.01		Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	10,000,000
3	30	02	2.01	01	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10,000,000

1					3	
3	30	02	2.02		Kegiatan : Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4,000,000
3	30	02	2.02	01	Sub Kegiatan : Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4,000,000
3	30	02	2.07		Kegiatan : Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	4,000,000
3	30	02	2.07	01	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	4,000,000
3	30	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>3,088,242,687</b>
3	30	03	2.01		Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3,088,242,687
3	30	03	2.01	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	370,000,000
3	30	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2,718,242,687
3	30	04			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>7,127,000,000</b>
3	30	04	2.02		Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten	7,117,000,000
3	30	04	2.02	01	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	150,000,000
3	30	04	2.02	02	Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	72,000,000
3	30	04	2.02	03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6,895,000,000
3	30	04	2.03		Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000
3	30	04	2.03	03	Sub Kegiatan : Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10,000,000
3	30	05			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>120,000,000</b>
3	30	05	2.01		Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000
3	30	05	2.01	01	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	20,000,000
3	30	05	2.01	03	Sub Kegiatan : Pameran Dagang Lokal	100,000,000
3	30	06			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>147,500,000</b>
3	30	06	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	147,500,000
3	30	06	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	122,470,000
3	30	06	2.01	02	Sub kegiatan : Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	25,030,000
3	30	07			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>50,000,000</b>
3	30	07	2.01		Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	50,000,000
3	30	07	2.01	01	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50,000,000
					<b>Jumlah</b>	<b>14,147,100,892</b>

Kepala Dinas Perdagangan  
Kabupaten Lombok Timur

